



# CALL FOR PAPER

Conference on Economic and Business Innovation  
Sekretariat: FakultasEkonomidanBisnis, UniversitasWidyagama Malang  
Jalan Borobudur No. 35, Malang, JawaTimur, 65142  
Email: febiuwg@gmail.com



IKATAN AKUNTAN INDONESIA  
KOMPARTEMEN AKUNTAN PENDIDIK  
FORUM DOSEN AKUNTANSI PUBLIK

## PENGARUH DANA PERIMBANGAN TERHADAP KEMISKINAN DI PROVINSI ACEH

Riqah Balqis<sup>1</sup>, Suriani<sup>2</sup>

<sup>1</sup>Fakultas EkonomidanBisnis, Universitas Syiahkuala, email: Riqahbalqis6@gmail.com

<sup>2</sup>Fakultas EkonomidanBisnis, Universitas Syiahkuala, email: Suriani@unsyiah.ac.id

### ***Abstract (Font Times New Roman 9, Bold, Italics)***

*This study aims to determine the effect of intergovernmental transfer on poverty in Aceh Province in the long term and short term. The variables in this study consisted of balance funds and the number of poor people to see the effect of both long and short term balancing funds on poverty levels. The method of analysis uses the ARDL Autoregressive Distributed Lag (ARDL) method. The results showed that there is an effect on the short term between the variable balance funds to the variable number of poor people, and there is a negative relationship between the variable balance funds to the variable number of poor people. But in the long run there is no influence between the variable balance fund to the variable number of poor people and there is a negative relationship between the variable balance fund to the variable number of poor people. It is expected that by allocating balance funds, it can be used as well as possible and on target so that it can reduce poverty in the long run.*

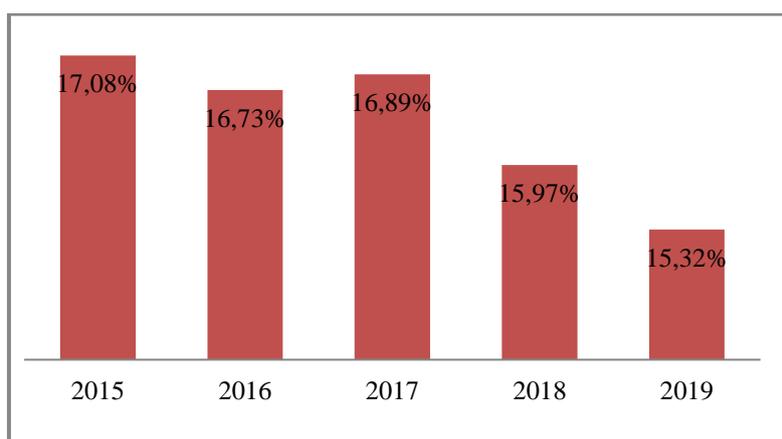
***Keywords:*** *intergovernmental transfer, number of poor people, and Panel ARDL*

## PENDAHULUAN

Problematika kemiskinan masih menjadi masalah besar pada setiap negara, hampir diseluruh bagian negara dunia menghadapi masalah kemiskinan. Badan Pusat Statistik 2018 mengemukakan, kemiskinan merupakan suatu kondisi yang menggambarkan individu mengalami ketidakmampuan pada kehidupannya berupa kebutuhan dasar. Kebutuhan dasar makanan, maupun bukan makanan yang tidak mampu dipenuhi oleh individu sehingga tidak dapat hidup dengan layak ini adalah pembagian dari kebutuhan dasar. Atau dengan kata lain kemiskinan merupakan ketidakmampuan dalam konsumsi pada kebutuhan minimum, ketiadaan rumah, dan pakaian untuk keberlangsungan kehidupannya (Sudewi & Wiranthi, 2013).

Indonesia termasuk dari beberapa negara di dunia yang mengalami permasalahan kemiskinan. Indonesia merupakan negara berkembang yang memiliki jumlah populasi sebesar 269 juta jiwa atau 3,49 persen dari seluruh penduduk bumi (World Bank, 2019), dengan jumlah masyarakat miskin sebesar 24,79 juta jiwa atau 9,22 persen (BPS, 2019). Indonesia memiliki enam provinsi termiskin yakni Papua, Papua Barat, Nusa Tenggara Timur, Maluku, Gorontalo, dan Aceh.

Provinsi Aceh merupakan satu diantara beberapa provinsi di Indonesia yang mempunyai persentase penduduk miskin lebih tinggi bila dibandingkan dengan persentase penduduk miskin nasional yakni mencapai 15,32 persen dari persentase nasional yang hanya sebesar 9,22 persen (BPS, 2019). Berikut merupakan grafik dari persentase penduduk miskin Provinsi Aceh:



Gambar 1. Persentase Penduduk Miskin Provinsi Aceh Tahun 2015 – 2019

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2019

Berdasarkan Gambar 1, persentase jumlah penduduk miskin Provinsi Aceh tahun 2015 sampai 2019 memiliki gerakan fluktuasi. Tahun 2015 hingga 2016 Provinsi Aceh mengalami penurunan pada persentase penduduk miskin dari 17,08 persen menjadi 16,73 persen, namun pada tahun 2017 Provinsi Aceh mengalami kenaikan pada persentase penduduk miskin menjadi 16,89 persen setelah tahun sebelumnya mencapai 16,73 persen. Selanjutnya pada tahun 2018 hingga tahun 2019 Provinsi Aceh mengalami penurunan kembali pada persentase penduduk miskin yakni 15,97 persen menjadi 15,32 persen. Namun persentase penduduk miskin Aceh memiliki posisi di atas persentase jumlah penduduk miskin nasional yakni sebesar 9,22 persen pada tahun 2019. Hal ini menandakan bahwa Provinsi Aceh memiliki tingkat kemiskinan yang tinggi juga memiliki banyak jumlah penduduk miskin.

Kondisi kemiskinan yang terjadi di Provinsi Aceh disebabkan kurangnya persediaan pekerjaan yang lebih sedikit jika dibandingkan dengan jumlah masyarakat yang membutuhkan pekerjaan sehingga menyebabkan pengangguran (Andiny & Mandasari, 2017), kultur individu masyarakat Aceh belum siap menyongsong kemajuan, struktur sosial masyarakat Aceh, dan diperkuat dengan investasi yang rendah

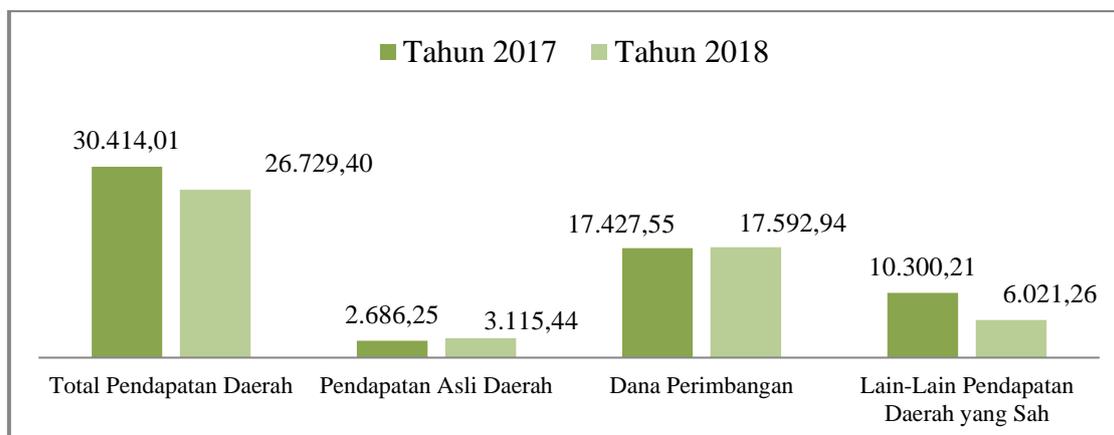
pada Provinsi Aceh. PLT Gubernur Aceh, Nova Iriansyah mengatakan bahwa “kondisi kemiskinan pada Provinsi Aceh disebabkan oleh kultur individu serta struktur sosial masyarakat Aceh” (Serambinews.com, dikutip pada 5 Agustus 2019).

Melihat paparan mengenai kondisi kemiskinan di Provinsi Aceh maka sangat diperlukan kebijakan dalam mengurangi kemiskinan tersebut. Pemerintah pusat beserta pemerintah daerah diwajibkan bertindak dalam mengurangi kemiskinan tersebut. Pengurangan kemiskinan tersebut dapat dicapai melalui peningkatan terhadap pertumbuhan ekonomi (Jonaidi, 2012). Pendistribusian pendapatan yang merata pada masyarakat, serta alokasi penggunaan kebijakan yang tepat oleh pemerintah tercermin oleh penganggaran pendapatan dan belanja pemerintah yang diarahkan kepada penduduk miskin (*pro-poor budgetting*). Sehingga dengan diberlakukan kebijakan yang tepat dalam menurunkan tingkat kemiskinan pada masyarakat akan meningkatkan taraf hidup masyarakat setempat (Panji & Indrajaya, 2016).

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang berpihak kepada masyarakat dapat dipergunakan oleh pemerintah daerah untuk menjadi salah satu kebijakan dalam meningkatkan kesejahteraan penduduk dan tercapainya standar terhadap pelayanan publik untuk masyarakat sehingga dapat mengatasi kemiskinan masyarakat daerah melalui cara pengalokasian APBD yang tepat dengan permasalahan tersebut (Mulyati & Yusriadi, 2018). Oleh sebab itu muncul Undang-Undang No.32 tahun 2004 mengenai pemerintahan pada suatu daerah dan Undang-Undang No.33 tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antar pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

Pengaturan pengalokasian perimbangan keuangan terhadap pemerintah daerah oleh Undang-Undang No.33 Tahun 2004, menyebutkan dana perimbangan merupakan dana untuk pendanaan atas kebutuhan suatu daerah dalam menjalankan kewenangan pemerintahan atau desentralisasi yang diberikan oleh pemerintah pusat, dana tersebut berasal dari pendapatan negara atau pendapatan APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara). Pada tahun 2002, pengalokasian dana APBN terhadap daerah berbentuk dana perimbangan seiring dengan pelaksanaan desentralisasi fiskal (Suriani & Saifunnizar, 2017).

Pemberian dana perimbangan tersebut tidak kekal pemberiannya, melainkan hanya sementara selama suatu daerah belum dapat mandiri dalam memenuhi kebutuhan daerahnya. Maka diharapkan kepada pemerintah daerah tidak menggantungkan sumber keuangan daerah melalui dana perimbangan tersebut, sebaliknya dapat mengatur strategi agar Penerimaan Asli Daerah (PAD) dapat ditingkatkan supaya kemandirian daerah dapat tercapai, suatu daerah dinyatakan memiliki kemandirian dilihat dari tingginya rasio PAD (Swandewi, 2014). Pada Gambar 2, terlihat bahwa total pendapatan pemerintah kabupaten/kota seluruh Provinsi Aceh tahun 2017 hingga tahun 2018, terdiri didominasi oleh dana perimbangan. Sehingga dapat dikatakan bahwa dana perimbangan lebih dominan terhadap pendapatan keuangan pemerintah di Provinsi Aceh, bahkan pengalokasian dana perimbangan ini terus meningkat disetiap tahunnya. Realisasi pendapatan pemerintah Kabupaten/Kota Provinsi Aceh tahun 2017 hingga 2018 yang diperlihatkan pada Gambar 2:



**Gambar 2. Realisasi Pendapatan Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh Periode 2017 -2018 (Rupiah)**

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2018.

Tingginya tingkat kontribusi dana perimbangan tersebut mengindikasikan bahwa ketergantungan yang tinggi pada daerah Aceh terhadap pengalokasian dana dari pemerintah pusat. Ketergantungan yang tinggi tersebut akan membuat rusaknya roda pemerintahan Aceh dan proses pembangunan daerah Aceh apabila pemberian dana perimbangan ini dihentikan, oleh karena itu pemerintah Aceh harus membuat perencanaan yang tepat terhadap proses pembangunan di masa yang akan datang untuk kemandirian daerah setempat apabila dana perimbangan ini dihentikan.

Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 mengklasifikasikan dana perimbangan dibagi menjadi: Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Dana Bagi Hasil (DBH) berupa bagi hasil pajak bukan pajak atau sumber daya alam. Dana Alokasi Umum (DAU) adalah dana untuk menutup kesenjangan fiskal (*Fiscal Gap*) antar daerah bersumber dari alokasi dana APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara). Atau berperan pemeratakan kemampuan keuangan antar daerah untuk membantu peran pemerintah daerah untuk memandirikan daerahnya, transfer dana diberikan kepada pemerintah daerah dalam melaksanakan peran desentralisasi.

Dana Alokasi Khusus (DAK) merupakan dana yang bertujuan membantu serta pendanaan pada kegiatan khusus yang termasuk urusan daerah yang bersesuaian terhadap tujuan nasional (*Specific Grants*), ber sumber dari dana APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) yang diberikan terhadap pemerintah daerah dalam pelaksanaan desentralisasi.

Dana Bagi Hasil (DBH) merupakan dana yang memiliki tujuan sebagai pendanaan atas kebutuhan daerah berdasarkan angka persentase yang disalurkan oleh daerah penghasil. Dana tersebut berasal dari pengalokasian dana APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara), yang diberikan kepada pemerintah daerah untuk pelaksanaan desentralisasi. Dana tersebut terbagi menjadi, DBH pajak dan DBH non-pajak (sumber daya alam) (Mulyati & Yusriadi, 2018).

Berdasarkan fenomena-fenomena dan kajian teori yang telah dijelaskan, secara keseluruhan terdapat dana perimbangan meningkat disetiap tahunnya di Provinsi Aceh akan tetapi jumlah penduduk miskin masih tinggi. Seharusnya dengan meningkatnya pertumbuhan dana perimbangan dapat membantu peran pemerintah dalam mengatasi permasalahan kemiskinan. Kemudian peneliti tertarik dalam

melaksanakan kegiatan penelitian lebih lanjut mengenai penelitian pengaruh dana perimbangan terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Aceh dalam periode jangka panjang dan jangka pendek.

### **KAJIAN TEORI**

#### **Kemiskinan**

Kemiskinan adalah standar kehidupan rendah ditandai dengan tingkat kekurangan materi apabila dibandingkan dengan standar kehidupan yang berlaku pada masyarakat sekitarnya, serta kekurangan atas sumber daya yang digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan (Andiny & Mandasari, 2017). Badan Pusat Statistik 2018 mengemukakan definisi dari kemiskinan yakni suatu kondisi ketidakmampuan pada masyarakat individu untuk memenuhi kebutuhan atau keperluan kehidupan dasar minimal, kebutuhan dasar ini dikelompokkan menjadi kebutuhan dasar makanan, maupun kebutuhan dasar bukan makanan yang tidak mampu dipenuhi oleh individu sehingga individu tidak dapat hidup dengan layak.

Penyebab kemiskinan yang terjadi di masyarakat disebabkan oleh, jumlah lapangan kerja lebih sedikit dari pada jumlah angkatan kerja, sehingga angka pengangguran dan kemiskinan pada masyarakat meningkat (Andiny & Mandasari, 2017). Pengangguran pada masyarakat mengakibatkan upah atau gaji tidak tersedia sehingga masyarakat tidak dapat memenuhi kebutuhan hidupnya.

Kultur individu maupun struktural sosial masyarakat. Kultur individu masyarakat terikat kepada struktur budaya masyarakat, sehingga masyarakat menganggap budaya merupakan alasan penyebab kemiskinan. Masyarakat tidak giat bekerja dan tidak produktif, tidak terobsesi keuntungan atau dengan kata lain kebiasaan hidup masyarakat yang merasa serba cukup akan menjadi sebab kemiskinan. Kemiskinan yang disebabkan oleh struktural dan sosial ialah, terjadinya kemiskinan disebabkan ketidakmerataan hasil pembangunan antar daerah (Rudi Wahyudi, 2016).

#### **Dana Perimbangan**

Dana perimbangan menurut Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dialokasikan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah, dengan tujuan pendanaan kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Dana Perimbangan mempunyai dasar hukum yang mengatur dana tersebut dalam Undang-Undang No.33 Tahun 2004. Bahwa pembagian dana perimbangan kepada pemerintah daerah dilakukan secara adil, proporsional, demokratis, transparan, dan bertanggung jawab dengan mempertimbangkan kepada potensi, kondisi, serta kebutuhan yang sesuai kepada daerah yang telah diberikan dana perimbangan.

Tujuan pengalokasian dana perimbangan sebagaimana yang disebutkan pada Undang-Undang No.33 Tahun 2004 Pasal 3, bertujuan untuk pengurangan atas kesenjangan fiskal serta mendukung penciptaan keseimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Terdapat tujuan lainnya dalam pemberian dana perimbangan ini dimaksudkan agar tercapai dan terjamin standarisasi terhadap pelayanan publik masyarakat setempat (Pratomo, 2015).

Perimbangan keuangan dilaksanakan secara desentralisasi. Desentralisasi ialah kewenangan terhadap pemerintah daerah dalam pelaksanaan pembangunan daerah. Pelaksanaan pembangunan daerah yang dilakukan berdasarkan prinsip efektif, efisien, partisipatif, terbuka dan akuntabilitas (Saputra & Mahmudi, 2012).

#### **Hubungan Dana Perimbangan terhadap Kemiskinan**

Teori Keynisan atau Teori Klasik Keynes, yang dikemukakan oleh John Maynard Keynes tahun 1930. Beranggapan bahwa campur tangan atau peranan pemerintah dapat mempengaruhi permintaan agregate pada masyarakat sehingga mencapai posisi *Full Employment* (tingkat tenaga kerja penuh).

Permintaan agregate yang dimaksud merupakan keseluruhan dari jumlah uang yang dibelanjakan atau total pengeluaran pada seluruh lapisan masyarakat.

Adanya campur tangan pemerintah atau peranan pemerintah dalam perekonomian suatu negara, akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi serta pembangunan ekonomi, melalui kebijakan fiskal seperti perpajakan maupun belanja pemerintah. Peningkatan terhadap pertumbuhan ekonomi, akan membuat tingkat kemiskinan masyarakat akan menurun (Jonaidi, 2012). Pengeluaran pemerintah melalui belanja pemerintah (*government expenditure*) menurut (Musgrave, 1994), merupakan salah satu kebijakan anggaran pemerintah (*budget policy*) yang dapat mempengaruhi perekonomian negara, salah satunya terhadap *output effect* (perubahan terhadap output). *Output effect* yakni keputusan yang dibuat oleh pemerintah dalam menentukan penerimaan maupun pengeluaran belanja pemerintah, dalam menyediakan barang publik serta menyediakan layanan kepada masyarakat dengan tujuan mengatur roda perekonomian.

Belanja pemerintah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) salah satunya terdapat belanja terhadap kebutuhan daerah atau transfer ke daerah yang merupakan pembagian dana APBN kepada pemerintah daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi fiskal daerah yang disebut dengan dana perimbangan, dana otonomi khusus, dan dana penyesuaian yang diberikan kepada pemerintah daerah. Dengan diberlakukan transfer dari pemerintah pusat melalui dana perimbangan kepada pemerintah daerah akan menurunkan tingkat kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan pada daerah.

### METODE PENELITIAN

Dalam pengkajian penelitian menitikberatkan dengan tujuan mendapati akibat atau pengaruh dana perimbangan terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Aceh. Jenis data dalam penelitian merupakan data panel atau gabungan dari data *time series* dan *cross section*, dan didapatkan melalui Badan Pusat Statistik (BPS) yang memuat data mengenai jumlah penduduk miskin, dana perimbangan, Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Dana Bagi Hasil (DBH) dan data dari Bank Dunia (*World Bank*) mengenai jumlah penduduk.

### Pengujian Model

Model yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis regresi data panel ARDL (*Autoregresif Distributed Lag*).dimana model ini dapat melihat pengaruh dari variabel dalam penelitian untuk jangka pendek dan jangka panjang dengan memakai software EViews 10 sebagai alat bantuan dalam mengolah data. Persamaan regresi data panel ARDL adalah:

$$\Delta JPM_{it} = \varphi_i(JPM_{it-1} - \beta'_i X_{it}) + \sum_{j=1}^p \alpha_{ij}^* \Delta JPM_{it-j} + \sum_{j=0}^p \delta_{ij}^* \Delta X_{it-j} + \mu_i + \varepsilon_{it}$$

Di mana  $JPM$  adalah jumlah penduduk miskin,  $X$  adalah dana perimbangan,  $\alpha$  adalah koefisien jangka pendek,  $\beta$  adalah koefisien jangka panjang,  $t$  adalah periode ke- $t$ ,  $j$  adalah kabupaten ke- $j$ ,  $i$  adalah lag,  $\varphi$  adalah dampak mekanisme korektor kesalahan dan  $\mu$  adalah *error term*.

### HASIL DAN PEMBAHASAN

#### Hasil Uji Stasioneritas

Tujuan dilakukan pengujian stasioner adalah membuktikan bahwa data hasil regresi ialah tidak mengandung *unit root* atau stasioner dan memperhatikan tidak terdapat regresi lancung (*spurious regression*) pada hubungan antara variabel terikat dan variabel bebas (Novalina & Rusiadi, 2018).

## Pengaruh Dana Perimbangan Terhadap Kemiskinan di Provinsi Aceh

Tabel 1. Uji Stasionaritas Variabel Jumlah penduduk Miskin (JPM)

Method	Statistic	Prob.**	Cross-section	Obs
Null: Unit root (assumes common unit root process)				
Levin, Lin & Chu t*	-12,6170	0,0000	23	115
Null: Unit root (assumes individual unit root process)				
Im, Pesaran and Shin W-Stat	-1,7970	0,0362	23	115
ADF-Fisher Chi-Square	68,1158	0,0187	23	115
PP-Fisher Chi-Square	91,1235	0,0001	23	115

Sumber: Eviews, diolah, 2020

Pada Tabel 1, menunjukkan bahwa hasil dari uji stasioneritas bahwa variabel jumlah penduduk miskin terdapat nilai probabilitas adalah 0,0000 dimana nilai tersebut lebih kecil daripada alpha 0,05 atau 5 persen, oleh karena itu menolak  $H_0$  dan menerima  $H_1$  atau dapat dikatakan bahwa terdapat data yang stasioner atau tidak mempunyai akar unit dan dapat dikatakan sudah signifikan.

Tabel 2. Uji Stasionaritas Variabel Dana Perimbangan

Method	Statistic	Prob.**	Cross-section	Obs
Null: Unit root (assumes common unit root process)				
Levin, Lin & Chu t*	-11,8662	0,0000	23	115
Null: Unit root (assumes individual unit root process)				
Im, Pesaran and Shin W-Stat	-2,8492	0,0022	23	115
ADF-Fisher Chi-Square	84,2447	0,0005	23	115
PP-Fisher Chi-Square	142,369	0,0000	23	115

Sumber: Eviews, 2020, diolah

Tabel 2 memperlihatkan bahwa hasil dari uji stasioneritas bahwa variabel dana perimbangan menunjukkan nilai probabilitas yakni 0,0000 nilai tersebut menunjukkan lebih kecil daripada alpha 0,05 atau 5 persen, maka dapat diketahui bahwa menolak  $H_0$  dan menerima  $H_1$  atau dikatakan bahwa mempunyai data yang stasioner atau tidak mempunyai akar unit dan dapat dikatakan sudah signifikan.

### Hasil Uji Kointegrasi

Tujuan pengujian kointegrasi ialah mengetahui apakah data yang diamati oleh peneliti mempunyai hubungan jangka panjang antar variabel. Diterimanya model Panel ARDL apabila model tersebut memiliki lag yang terkointegrasi, dengan asumsi nilai *coeffecient* berslope negatif dan tingkat signifikan < 0,05 atau 5 persen.

Tabel 3. Uji Kointegrasi pada Uji Pedroni

	Statistic	Prob.	Weighted Statistic	Prob.
Panel v-Statistic	0,9408	0,1734	0,9968	0,1594
Panel rho-Statistic	0,4281	0,6657	0,5989	0,7254
Panel PP-Statistic	-3,0063	0,0013	-2,2804	0,0113
Panel ADF-Statistic	-3,0282	0,0012	-2,4124	0,0079
Between Dimension				
	Statistic	Prob.		
Group rho-Statistic	2,9939	0,9986		
Group PP-Statistic	-2,2950	0,0109		
Group ADF-Statistic	-2,2913	0,0110		

Sumber: Eviews, 2020, diolah.

Hasil uji pada Tabel 3 menunjukkan bahwa uji kointegrasi yang digunakan dengan Uji Pedroni, menunjukkan bahwa terdapat kointegrasi, dibuktikan dari perbandingan pada nilai-*statistic* atau nilai probabilitas. Apabila probabilitas memiliki nilai pada uji pedroni lebih kecil dari  $\alpha = 0,05$  atau 5 persen dan jika nilai *coeffecient statistic* berslope negatif, maka data dianggap terkointegrasi atau terdapat hubungan jangka panjang dan pada hipotesis menolak  $H_0$  dan menerima  $H_1$ . Maka dapat dikatakan bahwa terdapat kointegrasi antara variabel dana perimbangan dengan variabel Jumlah Penduduk Miskin (JPM),

Tabel 4. Uji Kointegrasi pada Uji Kao

	t-Statistic	Prob.
ADF	-5,4469	0,0000
Residual Variance	0,0015	
HAC Variance	0,0015	

Sumber: Eviews, 2020, diolah

Hasil uji pada Tabel 4 memperlihatkan bahwa uji kointegrasi dengan menggunakan Uji Kao juga memperlihatkan bahwa terdapat kointegrasi, dibuktikan dari nilai probabilitas yang menunjukkan nilai lebih kecil dari  $\alpha = 0,05$  atau 5 persen yakni 0,0000 dan jika nilai *coeffecient statistic* berslope negatif yaitu -5,4469, maka data dianggap terkointegrasi atau terdapat hubungan jangka panjang, sehingga pada hipotesis menolak  $H_0$  dan menerima  $H_1$ . Jadi dapat dikatakan bahwa terdapat kointegrasi antara variabel dana perimbangan dengan variabel Kemiskinan (JPM) sehingga menolak  $H_0$ .

### Hasil Estimasi Panel ARDL

Tabel 5 menunjukkan bahwa terdapat *lag* yang terkointegrasi diasumsikan seperti nilai *coeffecient* mempunyai *slope* negatif yakni sebesar -0,0713 dan memiliki tingkat signifikan kurang dari  $\alpha = 0,05$  atau 5 persen yaitu 0,0000. Hal ini menandakan bahwa diterimanya syarat pada model Panel ARDL dimana terdapat lag yang terkointegrasi pada *short run equation*. Dalam jangka panjang dana perimbangan tidak berpengaruh terhadap kemiskinan, dibuktikan dari nilai probabilitas sebesar 0,3470 yang lebih besar tingkat signifikansi alpha 0,05 persen. Namun dalam jangka pendek, dana perimbangan berpengaruh

terhadap kemiskinan di Provinsi Aceh. Hal ini dibuktikan dari nilai probabilitas lebih kecil dari alpha 0,05 pern yaitu sebesar 0,0041.

Tabel 5. *Output* Panel ARDL

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob*
<b>Long Run Equation</b>				
LDP	-0,0078	0,0083	-0,9470	0,3470
<b>Short Run Equation</b>				
COINTEQ01	-0,7793	0,1163	-6,6958	0,0000
D(LDP)	-0,0713	0,0239	-2,9733	0,0041
C	8,1073	1,2082	6,7101	0,0000

Sumber: Eviews, 2020, diolah

### Pembahasan

Pada periode jangka panjang, dana perimbangan tidak berpengaruh serta tidak signifikan antara variabel terhadap kemiskinan di Provinsi Aceh, sementara itu terdapat hubungan negatif antara variabel dana perimbangan terhadap variabel jumlah penduduk miskin. Sementara pada periode jangka pendek menunjukkan bahwa variabel dana perimbangan terhadap variabel jumlah penduduk miskin, terdapat pengaruh yang memiliki tingkat koefisien sebesar -0,0713 dengan tingkat probabilitas sebesar 0,0041 dan mempunyai hubungan negatif antara variabel dana perimbangan terhadap variabel jumlah penduduk miskin. Hal ini menunjukkan bahwa setiap kenaikan pada pengalokasian dana perimbangan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah meningkat, maka jumlah penduduk miskin di Provinsi Aceh dapat menurun dalam jangka pendek.

Hal ini sesuai berdasarkan Teori Keynisan atau Teori Klasik Keynes, yang dikemukakan oleh John Maynard Keynes tahun 1930. Teori tersebut Beranggapan bahwa campur tangan atau peranan pemerintah dapat mempengaruhi permintaan agregate pada masyarakat sehingga terjadi pencapaian pada posisi *Full Employment* (tingkat tenaga kerja penuh). Adanya campur tangan pemerintah atau peranan pemerintah dalam perekonomian suatu negara, akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi serta pembangunan ekonomi, melalui kebijakan fiskal seperti perpajakan maupun belanja pemerintah. Peningkatan terhadap pertumbuhan ekonomi, akan membuat tingkat kemiskinan masyarakat akan menurun (Jonaidi, 2012).

Belanja pemerintah dalam APBN salah satunya terdapat belanja daerah atau transfer kepada daerah berupa dana perimbangan, dana otonomi khusus, dan dana penyesuaian yang diberikan kepada pemerintah daerah oleh pemerintah pusat. Maka dari itu, dengan diberlakukannya transfer oleh pemerintah pusat melalui dana perimbangan kepada pemerintah daerah ditujukan agar dapat menurunkan tingkat kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan pada daerah.

Penelitian ini mempunyai persamaan dari hasil penelitian sebelumnya yang diteliti oleh Suriani dan Saifunnizar (2014) dalam penelitiannya memperlihatkan dana perimbangan memiliki hubungan negatif dan terdapat signifikan terhadap ketimpangan pembangunan Provinsi Aceh, yang mempunyai nilai signifikan 97 persen. Ketimpangan pembangunan yang terjadi akan membuat tingkat perbedaan pada kesejahteraan antar wilayah sehingga membuat perbedaan tingkat kemiskinan antar daerah.

Demikian pula dari hasil penelitian Manek & Badrudin (2016) menyebutkan bahwa dana perimbangan memiliki hubungan negatif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi dan kemiskinan, dan pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap kemiskinan memiliki hubungan negatif dan signifikan. Kemudian Rima (2017) dalam penelitiannya mengemukakan bahwa dana perimbangan terbagi menjadi Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Dana Bagi Hasil (DBH), di mana terdapat pengaruh DAU dan DBH memiliki hubungan negatif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan

di Kabupaten Padang Pariaman. Sedangkan DAK memiliki hubungan positif dan tidak signifikan terhadap tingkat kemiskinan di Kabupaten Padang Pariaman. Hubungan negative menunjukkan bahwa apabila alokasi dana perimbangan yang dilakukan meningkat maka tingkat kemiskinan akan menurun, begitu pula sebaliknya. Bila secara terpisah maka Ismail & Hakim (2015) mengemukakan bahwa Dana Perimbangan berupa Dana Bagi Hasil (DBH) dan Dana Alokasi Umum (DAU) mempunyai pengaruh negatif terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Bali.

Implikasi hasil dari penelitian ini yaitu bahwa dana perimbangan masih dapat dilanjutkan di Provinsi Aceh, namun harus tepat sasaran agar tidak hanya berpengaruh terhadap penurunan kemiskinan dalam jangka pendek tetapi juga dapat berpengaruh dalam jangka panjang. Oleh karena itu realisasi dana perimbangan harus didukung dengan peningkatan keahlian bagi penduduk miskin agar dapat mandiri.

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

Berdasarkan pembahasan maka kesimpulan dari hasil penelitian ini adalah terdapat pengaruh dana perimbangan terhadap kemiskinan penduduk miskin di Provinsi Aceh dalam jangka pendek. Sementara itu pada periode jangka panjang tidak terdapat pengaruh antara variabel dana perimbangan terhadap variabel jumlah penduduk miskin. Hubungan antara variabel dana perimbangan terhadap variabel jumlah penduduk miskin pada periode jangka pendek terdapat hubungan negatif. Hal ini menggambarkan bahwa periode jangka pendek pada setiap kenaikan pada pengalokasian dana perimbangan kepada pemerintah daerah oleh pemerintah pusat meningkat maka jumlah penduduk miskin di Provinsi Aceh menurun. Pada periode jangka panjang terdapat hubungan negatif antara variabel dana perimbangan terhadap kemiskinan namun tidak berpengaruh.

Dari hasil penelitian ini maka diharapkan dengan pengalokasian dana perimbangan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah dapat digunakan dengan sebaik-baiknya serta tepat sasaran pada daerah sehingga dapat mengurangi kemiskinan dalam jangka panjang di Provinsi Aceh. Kemudian diharapkan dengan pengalokasian dana perimbangan terhadap pemerintah daerah dapat digunakan untuk sebaik-baiknya, karena dana perimbangan memiliki hubungan keseimbangan jangka pendek menuju jangka panjang yang dibuktikan dengan uji kointegrasi pedroni serta uji kointegrasi kao.

## REFERENSI

- Andiny, P., & Mandasari, P. (2017). Analisis Pertumbuhan Ekonomi dan Kemiskinan terhadap Ketimpangan Di Provinsi Aceh. *Jurnal Penelitian Ekonomi Akuntansi (JENSI)*, 1(2), 196–210.
- Ananda, R., Jamal, A., & Mahmud, M. S. (2020). *Is the Economic Growth of ASEAN-10 related to Air Transportation ? A Panel ARDL Approach*. 12(1), 10 – 17
- Ismail, A., & Hakim, A. (2014). Peran Dana Perimbangan Terhadap Kemiskinan di Provinsi Bali. *Journal.uui.ac.id*, 95
- Jonaidi, A. (2012). Analisis Pertumbuhan Ekonomi dan Kemiskinan di Indonesia. *Kajian Ekonomi*, 1(April), 140–164.
- Kuniasari, A. (2019). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Bagi Hasil (DBH) dan Belanja Modal terhadap Pertumbuhan Ekonomi. *Journal of Chemical Information and Modeling*, 53(9), 1689-1699.
- Kolibu, M., Rimate, V. A., & Engka, D. S. M. (2019). Pengaruh Tingkat Inflasi, Investasi, Pertumbuhan Ekonomi Dan Tingkat Pengangguran Terhadap Tingkat Kemiskinan Di Provinsi Sulawesi Utara. *Jurnal Pembangunan Ekonomi Dan Keuangan Daerah*, 19(3), 1–14. <https://doi.org/10.35794/jpekd.16456.19.3.2017>
- Manek, M., & Badrudin, R. (2017). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Kemiskinan di Provinsi Nusa Tenggara Timur. *Telaah Bisnis*, 17(2), 81-98.
- Mulyati, S., & Yusriadi, Y. (2018). Dana Bagi Hasil dan Dana Alokasi Umum terhadap Belanja Daerah di Provinsi Aceh. *Agregat*.
- Musgrave, Richard A. (1994). *Public Finance In Theory and Practice*. New York: Mc Graw-Hill Inc.
- Novalina, A., & Rusiadi. (2018). *Leading Indicator Stabilitas Ekonomi Di Negara CIVI (China, India, Vietnam dan Indonesia)* pendekatan panel ARDL. 4(1), 1 – 12
- Panji, I., & Indrajaya, I. (2016). Pengaruh Dana Perimbangan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Dan Tingkat Kemiskinan Di Provinsi Bali. *E-Jurnal Ekonomi Pembangunan Universitas Udayana*, 5(3), 316–337.
- Pratomo, andyka arief. (2015). *Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Bagi Hasil dan Belanja Daerah terhadap Tingkat Kemiskinan DKI Jakarta*. 48.
- Rima, F. (2015). Analisis Pengaruh Desentralisasi Fiskal Terhadap Tingkat Kemiskinan di Kabupaten Padang Pariaman. (Vol. 3, Issue 2)
- Rita Canale, Rosaria. Liotti, Giorgio., & Marani, Ugo (2019). Structural Public Balance Adjustment and Poverty in Europe. *Science Direct, Vol 50*. 2-3.
- Rudi Wahyudi, A. H. S. S. (2016). Analisis Belanja Pemerintah Dan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Tingkat Kemiskinan Di Aceh. *Jurnal Ilmu Ekonomi : Program Pascasarjana Unsyiah*, 2(3), 49–59.
- Saputra, B., & Mahmudi. (2012). Pengaruh Desentralisasi Fiskal terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Kesejahteraan Masyarakat. *Jurnal Akuntansi Dan Auditing Indonesia*.
- Sudewi, N. N. A., & Wiranthi, I. G. A. P. (2013). Pengaruh Desentralisasi Fiskal dan Korupsi Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Bali. *E-Jurnal Ekonomi Pembangunan Universitas Udayana*, 2(3), 135–141.
- Suriani & Saifunnizar. (2017). Analysis of Balanced Fund and Inequality of Development in Aceh Province. *Jurnal Ekonomi Dan Pembangunan, Vol.5, NO.(April)*, 95–100.
- Swandewi, A. A. I. A. (2014). Pengaruh Dana Perimbangan dan Kemandirian Keuangan Daerah terhadap Kesenjangan Anggaran dan Kesejahteraan Masyarakat pada Kabupaten/Kota di Provinsi Bali. *E-Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*.
- Zhou, Yang., & Li, Yurui (2018). Targeted Poverty Alleviation and Land Policy Innovation: Some Practice and Policy Implications From China. *Science Direct, Vol 74*, 4-5

